PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

(Survei pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat)

Oleh:

Risma Aprianti

Pembimbing

Ony Widilestariningtyas

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
2017

ABSTRAK

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang kurang baik akan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, selain itu dalam penyusunan laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah daerah diperlukan pemngendalian internal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 27 SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan responden 27 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis *SEM Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan *software*

SmartPLS 2.0.M3.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba, salah satu dari jenis organisasi sektor publik adalah intansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (V. Wiratna, 2015:2-5).

Sistem akuntansi pemerintah daerah disebut sebagai model sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan daerah, sistem akuntansi disusun dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja kauangan atau laporan surplus/defisit dan laporan perhitungan anggaran (Indra Bastian, 2007:30)

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi pemerintah daerah membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien (Hilmi, dalam beny, 2012).

Fenomena yang terjadi adalah menurut Bupati Bandung Barat Abubakar menyatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat mendapat penilaian CC, untuk Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemnepan RB). Hal tersebut dinilai mengecewakan oleh sebagain pengamat. "Dengan keluarnya penilaian LAKIP dari Kemenpan RB yang dimana hasilnya mendapatkan nilai CC. Kami menganggap hasilnya masih mengecewakan walaupun ada kenaikan dari sebelumnya C," tutur Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembangunan (Puspakolekbang) Holid Nurjamila melalui telepon seluler, Kamis (26/1).

Dikatakannya Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah KBB atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal. "Penilaian CC jika diskoring antara 50-65 bobotnya. Kalo melihat skor yang diraih, komponen yang paling mempengaruhi penilaian terletak pada Perencanaan Kerja atau Renstra yang selalu copy paste tiap tahunnya dan kurang selaras dengan RPJMD Visi Misi Bupati," tuturnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengumpulkan data mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji, menganalisis, dan mengkaji seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah
2. Untuk menguji, menganalisis, dan mengkaji seberapa besar pengaruh Pengendalian Interen terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap tulisan ini berguna dalam memecahkan masalah-masalah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pengendalian Intern Terhadap Kauntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah daerah.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Satuan kerja perangkat daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu agar kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti agar lebih paham

3. Pihak Akademis Lainnya

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi ataupun referensi yang diperlukan dan berguna untuk pengembangan pengetahuan lebih dlanjut

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut deddi, Ayuningtyas (2014:201) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer:.

Adapun indikator sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Deddi Nordiawan (2010:201) yaitu:

1) Pencatatan
2) Pengikhtisaran
3) Pelaporan

2.1.2 Pengendalian Internal

Menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) mengemukakan bahwa Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.

Adapun indikator pengendalian internal menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) yaitu :
1). Lingkungan Pengendalian
2). Penilaian Resiko
3). Aktivitas Pengendalian
4). Informasi dan Komunikasi Akuntansi
5). Pemantauan

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2006 : 83) mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Adapun indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah menurut Wakhyudi et al. (2007:10)

1). Penerapan Rencana Strategis
2). Pengukuran Kinerja
3). Pelaporan Kinerja
4). Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah/sistem akuntansi pemerintah daerah yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyususnan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyususnan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyususnan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut (Mardiasmo, 2009:84).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khodri Zulhman (2015) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terahadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperanan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif Rahmadi Murwanto (2012:195).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Netty Herawati (2014), dan Afilu, Irene (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian Internal Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis

H1: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah Daerah.

H2: Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 2) mengemukakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan ,metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel sehingga menghasilkan kesimpulan.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:53) yaitu Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih(variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen.

Sedangkan menurut Sugiyono (2010:29) menyatakan bahwa Metode verifikatif adalah yang digunakan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi kehidupan, verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. .

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono 2010:58 adalah Operasionalisasi variabel adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Derah, maka variabel-variabel ini akan diukur dalam penelitian ini adalah :

1) Variabel bebas/Independen (X)

Menurut Sugiyono (2014:39), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atu timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal ini variabel bebas yang akan diteliti adalah X1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan X2 Pengendalian Akuntansi.

2). Variabel terikat/dependan (Y)

Menurut Sugiyono (2014:39), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penerlitian ini yang menjadi variabel tidak bebas (Y) adalah Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah daerah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) mendefinisikan teknik pengumpulan data adalah Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena kinerja utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Nanang Sunyoto (2013:22) Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai obyek penelitian".

b. Kuesioner

Menurut Nanang Sunyoto (2013:23) Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket".

3.4 Penarikan Sampel

Pengertian populasi menurut sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pengertian sampel menurut sugiyono 2017:81 sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 27 SKPD. Unit observasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi dan kepala instansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:267) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

3.5.2 Uji Realibitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

3.6 Metode Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono, 2017:244 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorgnisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Metode Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:147) Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Metode Verifikatif

Menurut Masyhuri (2009:45) Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

4.1 Hasil Pengujian Vaiditas dan Realibiltas

1. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas > 0,30.

Berdasarkan perhitungan memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 (>0,30), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji kePengukuran Kinerjaan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji kePengukuran Kinerjaan dari alat ukur digunakan tehnik belah dua atau sering disebut *Split Half*.

Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel berdasarkan perhitungan *smartpls lebih* besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) atau Pengukuran Kinerja.

4.2 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) (Hipotesis 1)

Nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 6,964. Nilai tersebut lebih besar dari 2,069, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 32%.

2. Keterkaitan Pengendalian Intern (X2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) (Hipotesis 2)

Nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 6,485. Nilai tersebut lebih besar dari 2,069, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa

Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 37,5%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sementara nilai korelasi antara Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,765. Nilai 0,765 menurut Sugiyono (2013:250) berada pada interval 0,60 – 0,79 termasuk kategori kuat.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1) sebesar 6,964 dengan nilai t tabel sebesar 2,069. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (6,964 > 2,069) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yaitu sebesar 32% dan sisanya sebesar 68% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mardiasmo (2009:84), sistem akuntansi keuangan daerah/sistem akuntansi pemerintah daerah yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyususnan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyususnan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyususnan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Dan mendukung penelitian terdahulu oleh Khodri Zulhman (2015) yang menyatakan

bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terahadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

4.3.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sementara nilai korelasi antara Pengendalian Intern dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,782. Nilai 0,782 menurut Sugiyono (2013:250) berada pada interval 0,60 – 0,79 termasuk kategori kuat.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Pengendalian Intern (X2) sebesar 6,485 dengan nilai t tabel sebesar 2,069. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (6,485 > 2,069) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh Pengendalian Intern. Besarnya pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yaitu sebesar 37,5% dan sisanya sebesar 62,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Rahmadi Murwanto (2012:195) yang menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperanan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif.

Teori di atas didukung oleh berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Netty Herawati (2014), dan Afilu, Irene (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian Internal Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dengan kategori korelasi kuat. Namun ada beberapa yang menyebabkan sistem akuntansi pemerintah daerah belum maksimal yaitu pencatatan dan pelaporan. Sehingga sistem akuntansi pemerintah daerah kurang baik. Dan berimbas pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pemerintah daerah yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian ini sistem akuntansi pemerintah daerah yang terjadi pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat berada dalam kriteria cukup baik, namun masih terdapat *gap*, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada sistem akuntansi pemerintah daerah.
2. Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dengan kategori korelasi kuat atau erat. Namun ada yang menyebabkan pengendalian intern belum maksimal yaitu lingkungan pengendalian dan informasi dan komunikasi akuntansi. Sehingga penilaian pengendalian intern kurang baik. Dan berimbas pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pemerintah daerah yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian ini pengendalian intern yang terjadi pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat berada dalam kriteria cukup baik, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada pengendalian intern.

5.2 Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Bagi Pegawai
   Diharapkan sebaiknya pegawai pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat sistem akuntansi pemerintah daerah dengan cara para pegawai diwajibkan menggunakan sistem akuntansi double entry ketika pencatatan, serta di ikuti dengan metode pencatatan berdasarkan acrual basic untuk pengakuan aset. Kemudian selain pencatatan perlu ditingkatkan dalam segi pelaporan dengan cara para pegawai diwajibkan membuat laporan akuntansi terkait penyajian aset instansi dengan mengedepankan relevansi hasil atau data.
2. Bagi 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat
   Diharapkan sebaiknya 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan peningkatan pengendalian internal yang lebih baik lagi terhadap para pegawai nya. Kemudian diiringi pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem akuntansi atas pelaporan APBD.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan pengendalian

intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pemerintah daerah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afilu Hidayattullah, Irine Herdjiono, 2015. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja skpd di Merauke*. Prosiding seminar nasional Multi disiplin ilmu & Call for paper Unisbank(sendi_u) ISBN: 978-979-3649-81-8

Danang Sunyoto.2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi.* Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Herdianti, 2014. *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat:Jakarta

Indra Bastian, 2007. *Sistem akuntansi sektor publik,* Salemba Empat : Jakarta

Khodri Zulharman **,** 2015. *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah Daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada Peraturan perundangan Terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah(studi pada satuan kerja perangkat daerah kota pekanbaru)* Jurnal Online Mahasiswa FEKON Vol. 2 No. 2 ISSN: 2355-0854

Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik,* Yogyakarta: ANDI.

Mahsun. Mohamad 2006. *Pengukuran kinerja sektor publik.* Yogyakarta. BPFE

Netty Herawaty, dkk *, 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota jambi* Jurnal Cakrawala Akuntansi ISSN 1979-4851 Vol. 6 No. 2, September 2014, hal. 151-161

Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintah.* Jakarta: IN MEDIA

Rahmadi Murwanto. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. LPKPAP.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V.Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Pustaka Baru Press : Jakarta

Umi Narimawati, Dewi Anggadini, Linna Ismawati 2010, *Penulisan Karya Ilmiah:Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM,Genesis.* Bekasi.Jakarta: Genesis.